

PERAN ETIKA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh

Karen Alfa Pontoan

Universitas Katolik De La Salle Manado

e-mail: kpontoan@unikadelaslle.ac.id

ABSTRACT

Ethics is needed in an effort to formulate all matters related to public policy. In this sense, to formulate a public policy, it is necessary to provide ethical treasures so that what is agreed upon can become a benchmark in life together. Ethics is currently seen as important to be a force in collective life. It is also possible that ethics is a science that is oriented towards how our behavior patterns in a life with others. This research will focus on examining the extent to which ethics plays a role in the formulation of a public policy. In examining this, the author departs from an initial concept of the importance of ethics in public policy, then moves on to the stages that need to be taken in the formulation of public policy, then describes what public policy is like. Finally, the conclusion that can be a recommendation from the writing in this research is to put the position of ethics as an important element in a group.

Keywords: *role, ethics, public policy*

I. PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah sebuah hal yang penting dalam kehidupan bersama. Dalam konteks kekinian, terutama dalam lingkup kebijakan publik di Indonesia, penulis meyakini bahwa, mempelajari kebijakan publik menjadi lebih relevan dibandingkan sebelumnya, karena saat ini, kita sedang berada dalam sebuah situasi di mana terdapat banyak tantangan baik sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks, yang memerlukan solusi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu alasan mengapa kebijakan publik penting, sekurang-kurangnya dapat disebutkan seperti berikut: Bahwa kebijakan publik dapat membantu pemerintah untuk membuat keputusan yang tepat dalam hal mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang berada dalam masyarakat. Dengan mempelajari kebijakan publik, individu memperoleh ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi pada tata kelola yang efektif dan pada proses pembuatan kebijakan.

Demikian juga, kebijakan publik ini pada akhirnya memainkan peran penting dalam membentuk sebuah kelompok masyarakat, mendorong kemajuan sosial, dan memajukan kebaikan bersama. Hal ini memberikan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan yang kompleks seperti kemiskinan, kesenjangan, degradasi lingkungan, dan krisis kesehatan masyarakat.

Dalam upaya merumuskan kebijakan publik ini harus ditempuh antara lain melalui perencanaan strategis, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Maka dari itu, kebijakan publik bertujuan untuk adanya upaya untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam sebuah negara. Dari situasi ini, kita dapat menilai potensi solusi, dan menerapkan intervensi yang efektif untuk memitigasi dampak negatif dan selanjutnya akan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan publik mendukung tata kelola yang demokratis, akuntabilitas, dan transparansi dengan

memastikan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi warga negara. Dengan memfasilitasi dialog, kolaborasi, dan tindakan kolektif, kebijakan publik memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama, yang secara teoritis mendorong kohesi sosial, ketahanan, dan kesejahteraan.

Kendati demikian, kebijakan publik perlu diperkaya dengan nilai etika, karena vitalnya kebijakan publik itu. Haryatmoko (2015) menyatakan etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk benar salah sebuah perilaku atau tindakan keputusan dalam mengarahkan kebijakan publik. (Haryatmoko, 2015). Adapun etika publik memiliki tiga fokus perhatian yakni: Pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, isinya bukan hanya kode etik atau norma, tapi terutama dimensi reflektifnya, dengan itu maka etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Ketiga, fokus pada modalitas etika, yakni bagaimana menjembatani antara norma moral, yakni apa yang seharusnya dilakukan, dan tindakan faktual. Tekanan pada modalitas ini bertujuan untuk menjawab keluhan dan sinisme seperti hamper semua bidang telah memiliki kode etiknya, namun korupsi tetap merajalela.

Dari ketiga uraian tentang pentingnya etika dalam perumusan kebijakan publik ini, kita kemudian akan mengetahui, apakah etika publik benar-benar menjadi inti pokok dalam setiap perumusan kebijakan publik atau tidak. Hal itu akan diuraikan dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini akan fokus kepada upaya untuk menelaah tentang pentingnya etika dalam perumusan sebuah kebijakan publik yang akan diberlakukan dalam sebuah kelompok atau dalam scope tulisan ini adalah di negara Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan atau metode deskriptif analitis.

Metode ini akan penulis tempuh dengan diawali uraian tentang kebijakan publik, sebagai unsur penting kehidupan bersama, kemudian uraian tentang proses dan tahapan perumusan kebijakan publik, dari uraian kedua hal ini, akan dianalisis entahkah etika telah dimasukkan dalam proses perumusannya, mengingat pentingnya etika ini untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Setelah uraian tentang analisis tentang unsure tis dalam kebijakan publik, penulis akan merekomendasikan tentang pentingnya etika untuk dijadikan sebagai salah satu unsur peting dalam perumusan kebijakan publik.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Publik sebagai Unsur Penting Kehidupan

Sebagai pintu masuk yang penting dan menentukan, kita perlu memahami bahwa kebijakan merupakan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik sebagaimana yang dimaksud, mencakup apa pun yang ingin dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana uraian Thomas Dye, kebijakan publik dapat didefinisikan secara luas sebagai "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Pendek kata, kebijakan publik adalah aturan dan program pemerintah, yang dipertimbangkan secara individual maupun kolektif, yang dirumuskan dengan tujuan untuk mempengaruhi perubahan yang positif. Kebijakan publik pun secara fondasional merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang ditetapkan bahwa hukum publik diharapkan diharapkan ditaati oleh hukum publik. Maka dari itu, istilah kebijakan publik selalu mengacu pada tindakan pemerintah dan niat yang menentukan tindakan-tindakan dalam kelompok. (Pardhasaradhi, 2021).

Definisi di atas menyiratkan beberapa hal-hal berikut: Pertama, Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya diputuskan atau dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan merupakan hubungan unit-unit pemerintah dengan lingkungan politik tertentu dalam

suatu sistem administrasi tertentu. Kedua, Kebijakan publik berorientasi pada tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak secara umum, maka kebijakan publik itu dirumuskan dan diimplementasikan dalam realitas. (Walker, 2023). Kebijakan publik dalam arti luas, mengacu pada kebijakan (rencana tentang apa yang harus dilakukan) yang dirumuskan dan diimplementasikan untuk kepentingan publik. Jika dilihat dari sudut pandang sempit, kebijakan publik justru merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, juga karena di banyak tempat, publik juga digunakan sebagai sinonim dari pemerintah.

Kendati demikian, muncul pertanyaan mendasar berikut: Bagaimana kebijakan publik itu menyangkut semua unsur kehidupan? Dalam menjawab pertanyaan ini, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perluasan cakupan kebijakan publik, yakni: Ilmu pengetahuan dan teknologi, industrialisasi, urbanisasi, perkembangan peran negara modern, dan peningkatan penekanan pada kegiatan kesejahteraan negara dll.

Perluasan cakupan tersebut, bukan tanpa dasar, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini akan merevolusi kehidupan manusia modern, melalui komunikasi dan transportasi. Perkembangan-perkembangan ini telah menggarisbawahi kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang khusus demi menghadapi tantangan dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Demikian juga, pertanian, industri, teknologi informasi, dan penelitian di bidang lain, membutuhkan formulasi kebijakan untuk menghadapi kemajuanyang dimaksud. Maka dari itu, perlulah dirumuskan sebuah kebijakan publik agar dapat dijalankan demi menyongsong kemajuan dunia dan peradaban.

Pendek kata, kebijakan publik adalah seperangkat prinsip, aturan, dan pedoman yang digunakan pemerintah untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang

memengaruhi kesejahteraan warganya. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, kesejahteraan sosial, transportasi, dan lingkungan. Pentingnya kebijakan publik tidak dapat dilebih-lebihkan, karena kebijakan publik memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat. Salah satu fungsi utama dari kebijakan publik adalah untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warganya. Sebagai contoh, di bidang kesehatan, kebijakan publik dapat menentukan jenis layanan yang tersedia bagi warga negara, serta peraturan yang mengatur penyedia layanan kesehatan. Dengan membuat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. (Walker, 2023).

Namun, pengembangan dan implementasi kebijakan publik yang efektif dapat menjadi hal yang kompleks dan menantang. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kelayakan politik, dampak ekonomi, dan penerimaan sosial, ketika membuat kebijakan. Mereka juga harus menyeimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga negara, bisnis, dan organisasi lainnya. Demikianlah, kebijakan publik dipandang sangat penting bagi berfungsinya masyarakat modern. Dengan membuat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan warganya, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi yang sama, kebijakan publik ini juga dapat mendorong kesetaraan sosial dan ekonomi serta mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim. Namun, pengembangan kebijakan publik yang efektif membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor, dan para pembuat kebijakan harus menyeimbangkan

kebutuhan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. (Walker, 2023).

2.2 Perumusan Kebijakan Publik

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kebijakan publik menjadi patokan yang menuntun kepada sebuah kehidupan bersama sebuah kelompok masyarakat. Kendati demikian, bagaimana prosedur perumusan kebijakan publik itu, merupakan sebuah unsur yang harus diuraikan, dipahami dan dengan mudah untuk menuntun dalam menjalankan kehidupan bersama yang dimaksud itu. Prosedur tersebut, sekurang-kurangnya dapat disebutkan seperti berikut ini:

Pertama, pengidentifikasian masalah dan kebutuhan yang diperlukan. Langkah pada tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial ini adalah ditempuh dengan cara pengumpulan data terkait masalah sosial yang dialami dan hidup di dalam masyarakat. Hal itu melalui pengidentifikasian berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi.

Kedua, menganalisis masalah dan kebutuhan yang diperlukan. Pada tahap ini, yang dikerjakan adalah mengolah, menganalisis data seputar masalah dan kebutuhan masyarakat untuk kemudian ditransformasikan dalam sebuah laporan akhir. Dalam hal ini, informasi yang perlu diketahui adalah menyangkut masalah apa juga kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Demikian juga, dianalisis terkait dampak apa yang bisa saja muncul apabila masalah yang dihadapi itu tidak dapat terpecahkan, termasuk siapa dan kelompok mana yang mengalami secara riil masalah tersebut.

Ketiga, penginformasian secara jelas terkait rencana sebuah kebijakan. Pada tahap ini, berdasarkan laporan hasil analisis yang telah dilakukan sebagaimana uraian di atas, kemudahan disusun sebuah rencana kebijakan. Rencana ini akan disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat karena hal itu terkait dengan isu kebijakan sosial yang akan diberlakukan, demi memperoleh tanggapan dan masukan. Hal ini juga akan diajukan ke lembaga perwakilan rakyat agar

dibahas, didiskusikan dan kemudian akan disetujui bersama.

Keempat, perumusan tujuan dari kebijakan publik. Setelah mendapatkan tujuan dan berbagai sasaran dari masyarakat, selanjutnya ditempuh berbagai macam model diskusi dan pembahasan atau juga bisa berupa uji publik, demi memperoleh alternatif pilihan kebijakan. Berbagai alternatif ini akan dianalisis lagi, dan dipertajam menjadi tujuan kebijakan.

Kelima, pemilihan model atau patokan kebijakan. Pemilihan dalam hal ini dilakukan untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang sangat efektif dan efisien untuk kemudian ditujukan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang telah dirancang tadi. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis fondasi ilmiah serta prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, tahap penentuan indikator sosial. Tahap ini ditempuh dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan pemilihan model kebijakan yang dapat terukur secara objektif. Indikator-indikator sosial ini akan berfungsi menjadi acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindakan atau benchmarking terhadap hasil yang akan dicapai.

Ketujuh, membangun dukungan dan legitimasi publik. Pada tahap ini, yang paling utama adalah mempublikasikan secara massif tentang rencana kebijakan yang telah disempurnakan, setelah melewati langkah-langkah sebagaimana telah diuraikan diatas. Pada akhirnya, tahap ini juga turut melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan yang akan dijalankan, termasuk melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan macam-macam kelompok masyarakat yang ada, demi tercapainya kesepakatan terkait kebijakan sosial yang akan diterapkan. (Abdulah, 2022).

2.3 Peran Etika dalam Pelayanan Publik/Etika dalam pelayanan publik

Uraian pengantar, fakta pentingnya kebijakan publik, serta langkah-langkah yang perlu untuk sebuah perumusan

kebijakan publik ini, dalam scope penelitian akan penulis tinjau sisi etisnya. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah etika dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan publik? Mengapa etika perlu menjadi khazanah yang dapat memperluas cakrawala luasnya kehidupan bersama (baca: Kehidupan sebuah negara atau kelompok). Pertanyaan yang fondasional ini penulis pijaki dengan uraian tentang peran etika dalam pelayanan publik.

Etika secara umum didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah benar dan salah serta tugas dan kewajiban moral. Seseorang yang menerapkan perilaku beretika tinggi pada akhirnya akan menjadi orang yang baik secara intrinsik, dan perbuatan baiknya berasal dari dalam dirinya. Di sisi yang sama, pendekatan menyeluruh terhadap etika publik yang didasarkan pada pertanggungjawaban kualitatif akan menghasilkan hasil yang baik bagi tata kelola pemerintahan. Demikian juga, nilai-nilai etika pelayanan publik meliputi: Kesetiaan, kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, kesetiaan, kesetiaan, memberikan penghargaan yang layak, tidak diskriminatif, tidak memuji diri sendiri.

Sejalan dengan itu Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menegaskan bahwa: Perilaku etis yang baik meliputi bersikap adil dan tidak diskriminatif; bersikap hati-hati, sopan dan ramah; bersikap tegas, dapat diandalkan dan tidak menghalang-halangi dalam mengambil keputusan; berperilaku profesional dan tidak mempersulit; mematuhi perintah atasan yang sah dan wajar; menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas dalam menyelenggarakan institusi; tidak membocorkan informasi dan dokumen yang wajib dirahasiakan; bersikap terbuka dan berupaya menghindari benturan kepentingan; melaksanakan kewajiban dengan sepenuh hati; tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik; proaktif dalam memberikan informasi yang benar untuk

memenuhi kepentingan publik; tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, bertindak secara tepat, dan tidak menyimpang dari prosedur standar. (Pribadi, 2018).

Adapun, instrumen utama untuk memperkuat integritas dalam organisasi publik adalah kode etik atau kode perilaku. Kode-kode ini dirumuskan untuk menangkap etos dari domain pelayanan publik dan profesi, dan memandu perilaku para pelaku. Baik organisasi internasional maupun pemerintah nasional merumuskan kode etik untuk pelayanan publik. UNCAC, misalnya, mendesak negara-negara untuk menerapkan "kode atau standar perilaku untuk pelaksanaan fungsi publik yang benar, terhormat dan tepat". Mengingat bahwa makna kinerja yang terhormat dan layak terkadang bergantung pada konteks, perumusan kode pelayanan publik berbeda dari satu Negara ke Negara lain. Selain itu, kode yang berbeda yang berbeda diadopsi untuk domain pelayanan publik yang berbeda atau jenis hubungan pemangku kepentingan (misalnya Kode Etik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau Kode Etik Pegawai Negeri Sipil) dapat mencerminkan nilai-nilai kontekstual tertentu. (Crime, 2017).

III. SIMPULAN

Sebuah kelompok masyarakat pada akhirnya mencitatakan sebuah konsep yang dinamakan good governance. Konsep ini tentu menjadi impian semua orang amat terlebih di dalam sebuah negara. Sebagaimana umum dikenal, good governance pada akhirnya menjadi cita-cita dan merupakan visi setiap penyelenggaraan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian, apa itu good governance. Secara sederhana good governance dipahami sebagai prinsip utama untuk mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publik bisa berjalan secara efisien, termasuk didalamnya, sebuah sistem pengadilan yang dapat diandalkan, dimana semua administrasinya dipandang bertanggungjawab terhadap publik.

(Kusumawati, 2019). Maka dari itu, setiap good governance, perlu juga sebuah khazanah etis agar bisa dijalankan secara berimbang sungguh-sungguh menjawab pelayanan publik yang maksimal. Maka dari itu, etika publik sangat diperlukan dalam kerangka itu.

Sebagaimana kita ketahui, prinsip-prinsip etika publik harus menjadi patokan dalam sebuah perumusan kebijakan publik, agar kehidupan bersama (good governance) bisa berjalan dengan baik. Sejalan dengan itu, tentu saja sebuah negara yang masuk kategori good governance, yang memiliki kebijakan publik yang dijadikan patokan berjalannya sebuah negara, akan sangat membantu karena hal itu mampu memberikan landasan pertimbangan etis setiap tindakan para pejabat publik. Dalam konteks itu, maka perlulah juga sebuah kemampuan yang sangat teknis untuk menganalisa setiap masalah yang masih perlu dilengkapi dengan kemampuan menangkap pertarungan etis yang biasanya tidak lepas dari masalah keadilan. Demikianlah nyata bahwa kemampuan ini mengandalkan kompetensi etika.

Jadi, yang menjadi kunci utama pada akhirnya adalah penerapan etika publik dalam masyarakat (kondisi riil publik). Mengapa demikian? Karena, etika publik adalah refleksi kritis tentang standar atau norma yang menentukan baik buruknya, benar salahnya sebuah perilaku, tindakan dan keputusan dalam upaya untuk mengarahkan kebijakan publik, demi menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan ketat dan jelas bahwa tiga fokus utama perhatian etika publik adalah: Pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan dengan keadaan, agar kehidupan bersama selalu up date (mampu menyesuaikan) dengan perkembangan peradaban. Kedua, etika publik tidak mutlak hanya berbicara kode etik atau norma, tetapi sarat dengan dimensi reflektifnya. Oleh karena itu, etika publik harus secara jelas menyasar kepada kualitas kebijakan yang

benar dan sesuai dengan perencanaan awal. Ketiga, etika publik sejatinya terfokus kepada bagaimana menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting karena setiap kehidupan faktual dalam masyarakat, seringkali tidak bisa terpantau dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kekuasaan (pemerintah). Oleh karena itu, maka perlulah ada jembatan yang bisa mengaitkan antar norma yang berlaku dan tindakan yang dipraktekan.

Jadi, etika publik sejatinya mengutamakan sebuah pengorganisasian sebuah kelompok agar tanggung jawab yang diemban bisa dijalankan. Demikian juga, didalamnya mengandung upaya yang mencari sistem, prosedur dan sarana yang akan memudahkan sebuah tindakan etis dalam kehidupan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, A. H. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 148.
- Crime, U. N. (2017). *Public Integrity and Ethics*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Haryatmoko. (2015). *Etika Publik: Untuk Itegritas Pejabat Publik dan Politisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumawati, M. P. (2019). HARMONISASI ANTARA ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Yuridis*.
- Pardhasaradhi, Y. (2021). *Public Policy: Concepts and Theories*. Jammu: University of Jammu.
- Pribadi, U. (2018). *Ethics in Public Service*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, .
- Walker, S. (2023). *The Importance of Public Policy in Shaping Society*. Retrieved from <https://www.alliedacademies.org/>: <https://www.alliedacademies.org/articles/the-importance-of-public-policy-in-shaping-society-24022.html>